

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan tempat yang kaya akan potensi keindahan alam, flora, fauna, etnis dan budaya yang beraneka ragam, sehingga memiliki potensi untuk dijadikan sebagai objek pariwisata. Dengan pengelolaan yang baik akan memberikan devisa yang cukup besar bagi dunia pariwisata. Secara umum pariwisata dipandang sebagai sektor yang dapat mendorong dan meningkatkan kegiatan pembangunan, membuka lapangan pekerjaan baru, meningkatkan pendapatan masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli daerah.<sup>1</sup>

Daerah merupakan suatu wilayah dalam negara yang berbentuk teritorial yang dapat dibedah melalui pengertian, batasan dan wewenang, dilihat dari segi administratif yang berdasar pada isi perundang-undangan. Pada era reformasi otonomi daerah sekarang ini, otonomi daerah dari negara memberikan hak dan wewenang untuk mengatur daerahnya sendiri. Bentuk urusan pemerintahan dan masyarakat memiliki kepentingan yang disatukan menjadi suatu sistem yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan munculnya kebijakan dan regulasi di setiap daerah, maka setiap pemerintahan yang ada di Daerah dapat membentuk rancangan pembangunan sesuai dengan potensi yang dimiliki setiap Daerah agar dapat memaksimalkan pembangunan Daerah terkait. Undang – undang nomor 23 Tahun 2014 Pasal 9

---

<sup>1</sup> Wardana. 2017. Potensi dan Strategi Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat. Bandar Lampung : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Hlm 1

Tentang Pemerintah Daerah. Di dalam urusan pemerintah daerah terdiri dari 3 bagian diantaranya, pertama Urusan pemerintahan Absolut yang berarti Sebuah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Yang kedua Urusan Pemerintahan Konkuren yang berarti Urusan pemerintah di bagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten / Kota. Yang ketiga Urusan Pemerintahan Umum yang berarti Semua urusan pemerintahan umum menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan.<sup>2</sup> Fungsi pembagian Urusan Pemerintahan ini yaitu untuk mengelompokkan urusan pemerintah daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh setiap daerah masing- masing.

Dalam melaksanakan otonomi daerah di perlukannya sebuah asas – asas yang di gunakan sebagai patokan menjalankan sebuah otonomi diantaranya: Pertama, Asas Desentralisasi yaitu Asas yang menyatakan penyerahan sebagian urusan pemerintah dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dengan tujuan untuk mengurus dan mengatur daerahnya sendiri. Kedua, Asas Dekonsentrasi yaitu Asas yang menyatakan bahwa pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepala wilayah atau Kepala instansi atau pejabat di atasnya secara vertikal. Ketiga, Asas Tugas Pembantuan yaitu asas yang menyatakan tugas turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah dengan berkewajiban mempertanggung jawabkannya kepada yang memberikan tugas.<sup>3</sup>

Pemberian Otonomi Kepada Daerah dilakukan Bersama-sama dengan Dekonsentrasi. Asas Dekonsentrasi dan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan

---

<sup>2</sup> Pasal 9 Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

<sup>3</sup> Inu Kencana Syafii, M.Si. 2014. Ilmu Pemerintahan. Jakarta : Bumi Aksara. Hlm 83

pemerintah di daerah sama pentingnya. Apakah suatu urusan pemerintah di daerah akan tetap diselenggarakan oleh perangkat pemerintah pusat (atas dasar asas dekonsentrasi) atau diserahkan kepada daerah sehingga menjadi urusan otonomi (atas dasar asas desentralisasi ) terutama di dasarkan pada daya guna dan hasil guna penyelenggaraan urusan pemerintah itu.

Sama halnya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto asas – asas tersebut sudah dilaksanakan secara maksimal oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto khususnya di Disparpora Kabupaten Mojokerto. Hal tersebut sama halnya yang ada di Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto bahwasannya pemerintah daerah kabupaten mojokerto, juga melaksanakan tugas-tugas / asas-asas yang diberikan oleh pemerintah pusat secara optimal. Pemerintah Kabupaten Mojokerto memiliki jabatan struktural bahwasannya secara horizontal yakni beberapa dinas yang ada di Kabupaten khususnya di Disparpora Kabupaten Mojokerto.

Potensi yang dapat dijadikan objek pariwisata diantaranya yaitu potensi alam, budaya, religi, kuliner, oleh-oleh khas dan lain-lain. Dengan semakin banyaknya potensi keanekaragaman yang dimiliki suatu daerah maka akan memberikan nilai keuntungan yang lebih untuk daerah tersebut. Setiap pemerintah daerah dapat memetakan setiap potensi objek pariwisata dan menyiapkan sumber daya yang sesuai pada setiap objek pariwisata.

Selain Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 adapun Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 yang mengatur tentang Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan

oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Pariwisata merupakan sektor unggulan terutama kontribusinya dalam meningkatkan nilai tambah dari sektor-sektor ekonomi yang ada di suatu wilayah tersebut. Sektor pariwisata merupakan sektor ekonomi yang unggul mendatangkan devisa bagi negara atau daerah tujuan wisata.<sup>4</sup> Disparpora kabupaten Mojokerto memberikan strategi yang optimal dalam mengembangkan daerahnya sendiri dikarenakan asas tersebut yang muncul & harus dilaksanakan pemerintah Kabupaten Mojokerto.

Dunia kepariwisataan menjadi sebuah industri yang menarik dikarenakan mengandung berbagai manfaat ekonomi dan merupakan salah satu sektor yang berpotensi untuk diandalkan sebagai perolehan devisa Negara. Melihat adanya berbagai potensi yang ada sangatlah tepat jika menggali dan mengembangkan potensi wisata menjadi sebuah asset wisata yang akan memacu perkembangan pariwisata daerah. Hakekat pariwisata bertumpu pada keunikan, kekhasan dan keaslian alam serta budaya yang ada dalam suatu masyarakat daerah. Hakekat ini menjadi konsep dasar dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata khususnya di Indonesia, maka dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata harus mengutamakan keseimbangan<sup>5</sup>.

Pengembangan pariwisata sebagai andalan perekonomian nasional dalam operasionalnya bertumpu pada potensi alam, potensi budaya, dan kehidupan masyarakat di lokasi pengembangan pariwisata, dalam pengembangan pariwisata, produk yang baik adalah obyek itu sendiri harus menarik untuk disaksikan

---

<sup>4</sup> Tama'ah, Wardoyo. 2008. Industri Pariwisata Membuka Lapangan Kerja. Jakarta: CV Indah Grafika

<sup>5</sup> Ridwan, Mohammad. 2012. Perencanaan Pengembangan Pariwisata. Medan: PT. Softmedia. hlm:15

maupun dipelajari, mempunyai kekhususan dan berbeda dengan obyek yang lain, prasarana menuju ke tempat wisata yang baik, tersedianya *fasilitas to see*, *something to do* dan *something to buy* serta akomodasi di tempat wisata yang menunjang. Pariwisata di Indonesia telah dianggap sebagai salah satu sektor ekonomi penting, disamping menjadi mesin penggerak ekonomi, pariwisata juga merupakan wahana yang menarik untuk mengurangi angka pengangguran mengingat banyaknya potensi wisata yang ada.<sup>6</sup>

Dalam mengembangkan sebuah pariwisata dibutuhkan sebuah Inovasi. Inovasi merupakan suatu hal yang harus dilakukan untuk mengembangkan sebuah objek pariwisata menjadi lebih baik lagi. Maka dari itu Disparpora Kabupaten Mojokerto dituntut untuk selalu mempunyai Inovasi yang tinggi agar mampu menyaingi daya tarik wisata lainnya, sehingga para wisatawan domestik maupun mancanegara lebih tertarik datang berkunjung pariwisata yang ada di Mojokerto. Keberhasilan dalam mengembangkan potensi wisata dipengaruhi beberapa faktor diantaranya, potensi alam dan Sumber daya manusia. Potensi alam dan Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam mengembangkan potensi wisata. Sumber daya manusia merupakan pelaku dari keseluruhan dalam tingkat perencanaan sampai dengan evaluasi yang mampu memanfaatkan potensi alam yang dimiliki oleh tempat wisata tersebut.

Wisata yang dimaksud disini yaitu wisata religi yang ada di Mojokerto yaitu Makam Religius Troloyo yang terletak di Desa Sentonorejo. Yang dimaksudkan disini lebih mengarah kepada wisata ziarah (wisata keagamaan) yang bertujuan

---

<sup>6</sup> Yoeti A. Oka. 1997. Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata. Jakarta: Pradnya Paramita. hlm:59

datang untuk bertemu atau yang disebut dengan ziarah (mengunjungi makam/kubur). Dalam Islam, ziarah kubur dianggap sebagai perbuatan sunnah yaitu apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila di tinggalkan tidak berdosa. Salah satu destinasi Pariwisata wisata religi yang ada di Kabupaten Mojokerto ialah Makam Troloyo yang terletak di Dukuh Sidodadi desa Sentonorejo.

## **1.2 RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan Uraian Latar Belakang diatas, maka dapat di rumuskan masalahnya yaitu: Bagaimana Inovasi Disparpora Kabupaten Mojokerto dalam Mengembangkan Potensi Wisata Religi Troloyo ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui Bagaimana Inovasi Disparpora Kabupaten Mojokerto dalam Mengembangkan Potensi Wisata Religi Troloyo ?

## **1.4 Manfaat**

### **a. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi untuk dijadikan sebagai pengelolaan dan pengembangan pada objek wisata religi Makam Troloyo agar menjadi lebih baik lagi

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan untuk meningkatkan pengembangan serta pengelolaan di objek daya tarik wisata religi.